

**PENGARUH DIGITALISASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
LAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) KOTA YOGYAKARTA (STUDI
SYSTEMATICS LITERATURE REVIEW)**

Ayu Anisa¹, Tasrim², Vivi Nawangsari³

^{1,2,3}Universitas PGRI Yogyakarta

E-mail: ayuanisa15@gmail.com¹, tasrim@upy.ac.id², vivinawangs@gmail.com³

ABSTRACT

Advancement of digital technology drives transformation of regional financial management to enhance efficiency, transparency, and accountability, core pillars of Good Corporate Governance (GCG). This study aims to analyze the impact of regional financial digitalization on public services in realizing GCG in Yogyakarta City through a Systematic Literature Review (SLR) approach. A literature review was conducted on academic articles from credible sources, focusing on implementation of systems such as Jogja Smart Service (JSS), e-SPTPD, and BLUD systems in Yogyakarta. Findings indicate regional financial digitalization improves accessibility and quality of public services, such as tax payments and online licensing, while strengthening transparency and accountability in GCG. Challenges include low digital literacy, limited human resources, and technical disruptions. This study recommends intensive training for civil servants, public socialization, and enhanced technological infrastructure to optimize regional financial digitalization.

Keywords: Regional Financial Digitalization, Public Services, Good Corporate Governance, Yogyakarta City, Systematic Literature Review.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas, menjadi pilar utama *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi keuangan daerah terhadap layanan publik untuk mewujudkan GCG di Kota Yogyakarta melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Kajian literatur dilakukan terhadap artikel akademik dari sumber terpercaya, fokus pada implementasi sistem contohnya *Jogja Smart Service* (JSS), e-SPTPD, dan sistem BLUD di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan digitalisasi keuangan daerah meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan publik, contohnya pembayaran pajak dan perizinan daring, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas GCG. Kendala meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan gangguan teknis. Penelitian merekomendasikan pelatihan intensif aparatur sipil negara, sosialisasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur teknologi guna mengoptimalkan digitalisasi keuangan daerah.

Kata Kunci: Digitalisasi Keuangan Daerah, Layanan Publik, *Good Corporate Governance*, Kota Yogyakarta, *Systematic Literature Review*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah, termasuk Kota Yogyakarta. Digitalisasi keuangan daerah, contohnya implementasi *Electronic Surat Pemberitahuan Pajak Daerah* (e-SPTPD) dan *Jogja Smart Service* (JSS), menjadi strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik (Wulandari et al., 2024). Sistem tersebut mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, misalnya pembayaran pajak dan informasi keuangan daerah, elemen penting mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) (Gumilar, 2019). GCG menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Suryani, 2017).

Tabel 1. Contoh Bentuk Digitalisasi di Yogyakarta

No	Digitalisasi Keuangan Daerah	Dampak pada Layanan Publik	Kontribusi terhadap GCG	Kendala	Sumber
1	e-SPTPD pembayaran pajak daring	Mengurangi antrean, meningkatkan kepuasan wajib pajak.	Meningkatkan akuntabilitas, menghilangkan pungutan liar.	Literasi digital rendah, server error.	(Wulandari et al., 2024)
2	JSS informasi keuangan terintegrasi	Meningkatkan akses perizinan, pengaduan, pelayanan publik.	Mendukung transparansi laporan keuangan publik.	Kurangnya sosialisasi masyarakat.	(Gumilar, 2019)
3	Sistem BLUD berbasis web dengan pelaporan real-time	Meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit daerah.	Meningkatkan transparansi informasi keuangan.	Keterbatasan versi mobile, pelatihan aparat.	(Waskito & Waskito, 2021)
4	<i>SiBakul Jogja</i> mendukung pendataan UMKM daring	Meningkatkan akses produk UMKM, mendukung ekonomi lokal.	Meningkatkan transparansi tata kelola UMKM.	Error aplikasi, pelatihan kurang mendalam.	(Nurfauziah et al., 2024)
5	Keterbukaan informasi keuangan DPPKA DIY (UU KIP)	Mendukung pengawasan publik melalui informasi terbuka.	Meningkatkan akuntabilitas badan publik.	Rendahnya komitmen badan publik, keterbatasan SDM.	(Suryani, 2017)

Sumber: Wulandari et al. (2024); Gumilar (2019); Waskito dan Waskito (2021); Nurfauziah et al. (2024); Suryani (2017)

Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya dan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menghadapi tuntutan menyediakan layanan publik responsif serta berkualitas. Penelitian menunjukkan digitalisasi keuangan daerah, contohnya sistem *Badan Layanan Umum Daerah* (BLUD) berbasis web, meningkatkan transparansi informasi keuangan dan efisiensi pelayanan (Waskito & Waskito, 2021). Kendala contohnya rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan gangguan teknis menghambat optimalisasi sistem tersebut (Kardina et al., 2024; Diansari et al., 2022). Studi di Desa Wisata Krebet, Bantul, menjelaskan adanya proses dalam keuangan yaitu berupa dengan pencatatan keuangan manual meningkatkan risiko kehilangan data, dapat diatasi melalui digitalisasi sederhana contohnya *Microsoft Excel* (Diansari et al., 2022).

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan memahami bagaimana digitalisasi keuangan daerah memperkuat layanan publik dan GCG di Kota Yogyakarta. Penelitian sebelumnya menjelaskan adanya sistem contohnya *Sistem Informasi Manajemen Daerah* (SIMDA) di Kota Pariaman mengurangi penyalahgunaan anggaran, sedangkan *Government Resource Management System* (GRMS) di Surabaya meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan (Kardina et al., 2024). Di Yogyakarta, program *SiBakul Jogja* memperlihatkan potensi digitalisasi meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM), secara tidak langsung mendukung ekonomi lokal serta layanan publik (Nurfauziah et al., 2024; Amari'a & Ulinnuha, 2023). Rendahnya komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi, sebagaimana ditemukan dalam evaluasi UU KIP di DIY, adanya proses dengan perlunya penguatan sistem digital mendukung GCG (Suryani, 2017). Penelitian menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) mengintegrasikan temuan dari berbagai studi di Yogyakarta dan wilayah lain, memberikan wawasan ilmiah tentang strategi digitalisasi keuangan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian antara lain (1) *bagaimana digitalisasi keuangan daerah memengaruhi efisiensi dan aksesibilitas layanan publik di Kota Yogyakarta?*; (2) *bagaimana digitalisasi keuangan daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas mewujudkan GCG di Kota Yogyakarta?*; dan (3) *apa kendala dihadapi dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah di Kota Yogyakarta, serta solusi dapat diterapkan?*

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi Keuangan Daerah

Digitalisasi keuangan daerah merujuk pada transformasi pengelolaan keuangan publik dari metode manual menjadi berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Sistem contohnya *Sistem Informasi Manajemen Daerah* (SIMDA), *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah* (SIPKD), dan *Electronic Surat Pemberitahuan Pajak Daerah* (e-SPTPD) mengotomatisasi pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta pengawasan anggaran daerah (Kardina et al., 2024).

Implementasi e-SPTPD di Kota Yogyakarta mempercepat pembayaran pajak daring, mengurangi potensi penyimpangan contohnya pungutan liar, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Wulandari et al., 2024). Sistem tersebut mengintegrasikan data keuangan, memastikan akurasi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Penelitian di sektor swasta, contohnya pada PT. IGP Internasional Yogyakarta, menunjukkan digitalisasi meningkatkan kinerja operasional melalui pengelolaan data akurat dan cepat (Bahas & Yamit, 2022). Dalam pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi membantu integrasi data antarinstansi, sebagaimana terlihat pada *Jogja Smart Service* (JSS), menyediakan informasi keuangan daerah secara real-time bagi masyarakat (Gumilar, 2019). Sistem tersebut mendukung pengambilan keputusan berbasis data, kunci pengelolaan keuangan efektif. Keberhasilan digitalisasi keuangan daerah bergantung pada infrastruktur teknologi memadai serta kompetensi sumber daya manusia mengelolanya. Investasi teknologi dan pelatihan aparatur menjadi prasyarat implementasi sukses.

Digitalisasi keuangan daerah memiliki implikasi sosial, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik. Penelitian di Desa Wisata Krebet, Bantul, menunjukkan penggunaan *Microsoft Excel* pencatatan keuangan UMKM mengurangi risiko kehilangan data serta meningkatkan transparansi (Diansari et al., 2022). Dalam keuangan daerah, sistem contohnya *Badan Layanan Umum Daerah* (BLUD) berbasis web masyarakat mengakses informasi keuangan secara

langsung, mendukung akuntabilitas pemerintah daerah (Waskito & Waskito, 2021). Digitalisasi keuangan daerah tidak sekadar meningkatkan efisiensi operasional, tetapi memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi terbuka.

Layanan Publik

Layanan publik mencakup penyediaan fasilitas serta informasi oleh pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya perizinan, pembayaran pajak, kesehatan, dan pengaduan. Digitalisasi meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi layanan publik, sebagaimana terlihat pada aplikasi JSS di Kota Yogyakarta, mengintegrasikan informasi perizinan, pajak, dan pengaduan dalam satu platform (Gumilar, 2019). Sistem tersebut masyarakat mengakses layanan kapan saja, mengurangi ketergantungan pelayanan tatap muka memakan waktu. Fitur contohnya *Single Sign-On* dan *Location-Based Services* memperkaya pengalaman pengguna, menjadikan layanan lebih interaktif.

Penelitian di Kota Medan yaitu kota lain sebagai pembanding contohnya bahkan memberikan penjelasan yaitu adanya sistem digital contohnya *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) mempersingkat penyusunan laporan keuangan, mendukung pelayanan publik lebih responsif (Kardina et al., 2024). Di Yogyakarta, e-SPTPD mempermudah wajib pajak, termasuk dari luar kota, membayar pajak tanpa mengunjungi kantor pemerintah, meningkatkan kepuasan masyarakat (Wulandari et al., 2024). Layanan publik berkualitas ditandai kemudahan akses, kecepatan respons, serta ketepatan informasi,

dicapai melalui digitalisasi. Sistem tersebut memastikan pelayanan merata, menjangkau masyarakat berbagai latar belakang.

Digitalisasi layanan publik mendukung inklusivitas menjangkau kelompok masyarakat sulit mengakses layanan. Program *SiBakul Jogja* di Yogyakarta dengan program contohnya digitalisasi pemasaran UMKM meningkatkan akses masyarakat terhadap produk lokal, secara tidak langsung memperkuat ekonomi daerah serta layanan publik (Nurfauziah et al., 2024). Keberhasilan layanan publik berbasis digital memerlukan sosialisasi efektif meningkatkan literasi digital masyarakat, sebagaimana terlihat tantangan implementasi JSS (Gumilar, 2019). Digitalisasi layanan publik memiliki potensi besar meningkatkan kualitas pelayanan, memerlukan pendekatan komprehensif mencakup edukasi dan infrastruktur teknologi.

Good Corporate Governance (GCG)

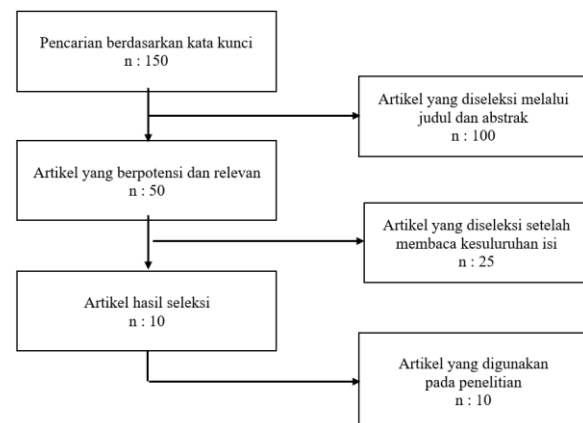
Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan pengelolaan organisasi publik. Dalam keuangan daerah, GCG diwujudkan laporan keuangan transparan serta pengawasan publik efektif, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Suryani, 2017). Evaluasi implementasi UU KIP di DIY adanya proses keterbukaan informasi keuangan, contohnya dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, meningkatkan akuntabilitas badan publik. Keterbukaan tersebut mendukung pengawasan masyarakat, elemen kunci GCG.

Digitalisasi keuangan daerah mendukung GCG menyediakan informasi mudah diakses masyarakat. Sistem BLUD berbasis web di Yogyakarta dengan penjelasan yaitu pelaporan keuangan real-time, meningkatkan transparansi (Waskito & Waskito, 2021). Penelitian pengelolaan wakaf di DIY menjelaskan adanya akuntabilitas ditingkatkan pelaporan keuangan terstruktur, dapat diadaptasi keuangan daerah melalui sistem digital (Muhammad & Sari, 2021). Prinsip GCG antara lain partisipasi masyarakat, diperkuat platform contohnya JSS memfasilitasi pengaduan serta pengawasan publik (Gumilar, 2019). Digitalisasi memastikan informasi keuangan akurat serta terkini, mendukung tata kelola responsif.

Penelitian sektor lain, contohnya pasar modal, proses adanya transparansi informasi keuangan meningkatkan kepercayaan investor, dianalogikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Sidiprasetija & Coandi, 2025). Program *SiBakul Jogja* menjelaskan proses adanya pendataan digital UMKM menciptakan tata kelola akuntabel hal tersebut mencakup juga dalam proses pengelolaan keuangan daerah (Amari'a & Ulinnuha, 2023). GCG dalam keuangan daerah diperkuat digitalisasi mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, memerlukan komitmen badan publik mengimplementasikannya secara konsisten. Investasi teknologi dan pelatihan aparatur menjadi prasyarat keberhasilan GCG berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) menganalisis pengaruh digitalisasi keuangan daerah terhadap layanan publik dan GCG di Kota Yogyakarta.



Gambar 1. Analisis *Systematics Literature Review* pada Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti, (2025)

Berdasarkan Gambar 1 dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian fokus pada efisiensi layanan publik, transparansi GCG, serta kendala digitalisasi keuangan daerah.

b. Pemilihan Sumber Literatur

Artikel diambil dari jurnal akademik terpercaya dipublikasikan 2017-2025, fokus Yogyakarta dan digitalisasi keuangan daerah. Sebanyak 11 jurnal dipilih berdasarkan kriteria inklusi kesesuaian dengan analisis topik, lokasi penelitian di DIY, serta metode penelitian jelas.

c. Pengumpulan Data

Data dikumpul dari jurnal mencakup teori, metodologi, serta temuan terkait digitalisasi keuangan, layanan publik, dan GCG.

d. Analisis Data

Data dianalisis tematik mengidentifikasi pola pengaruh digitalisasi terhadap layanan publik dan GCG, serta kendala implementasi.

e. Sintesis Hasil

Hasil jurnal disintesis menjawab pertanyaan penelitian serta menyusun rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel berikut memuat ringkasan 11 jurnal diunggah, mencakup identitas jurnal, teori digunakan, metodologi, serta hasil pembahasan mendalam. Semua jurnal dimasukkan memberikan gambaran komprehensif digitalisasi keuangan daerah, layanan publik, dan GCG.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Jurnal	Teori	Metodologi	Hasil Pembahasan
1	Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). <i>Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia</i> , 4 (1), 79-94.	Akuntabilitas, tata kelola wakaf	Kualitatif, <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP), wawancara 6 responden (wakif, nazhir, regulator)	Kurangnya pemahaman wakif pengelolaan wakaf resmi menyebabkan pengelolaan tidak optimal. Kompetensi nazhir rendah karena pengelolaan wakaf bukan profesi utama, koordinasi antarinstansi lemah. Solusi meliputi pelatihan intensif nazhir, sosialisasi UU Wakaf media daring, koordinasi rutin
				Badan Wakaf Indonesia dan pemerintah daerah. Laporan keuangan wakaf diaudit, kurang rinci, memberikan analisis perlunya digitalisasi transparansi. Temuan mendukung pentingnya pelatihan dan sistem digital akuntabilitas keuangan daerah.

2	Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). <i>Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik</i> , 11 (2), 615-620.	Digitalisasi keuangan, pelayanan publik	Kualitatif, studi literatur fokus Kota Medan	Sistem SIMDA, SIPKD, SIPD, dan GRMS meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. SIMDA di Pariaman mengurangi penyalahgunaan anggaran, GRMS di Surabaya mempermudah akses publik informasi keuangan. Tantangan meliputi kualitas sistem kurang memadai, pelatihan SDM terbatas, terutama SIPD Medan. Rekomendasi mencakup pelatihan ASN, evaluasi berkala sistem teknologi informasi. Hasil memberikan analisis digitalisasi mempercepat pelaporan keuangan, mendukung pelayanan publik efisien.
3	Waskito, N. P., & Waskito, N. P. (2021). Tidak disebutkan nama jurnal.	Digitalisasi keuangan, transparansi	Kualitatif, wawancara 10 hari, pengujian sistem (<i>whitebox</i> dan <i>blackbox</i>)	Sistem informasi keuangan BLUD berbasis web Yogyakarta, menggunakan <i>framework Laravel</i> , meningkatkan transparansi informasi keuangan serta efisiensi pelayanan publik. Sistem membantu proses pengguna mengakses data keuangan, admin mengelola data real-time. Pengujian menjelaskan sistem berfungsi baik, pengembangan versi mobile direkomendasikan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Sistem
				BLUD mendukung GCG menyediakan informasi terbuka, mempercepat pelayanan publik contohnya perizinan.
4	Wulandari, I. T., Rahmawati, A., & Maemunah, M. (2024). <i>Jurnal JISIPOL</i> , 8 (1), 98-108.	Inovasi pelayanan, digitalisasi pajak	Kualitatif, wawancara pegawai dan wajib pajak	Aplikasi e-SPTPD BPKAD Kota Yogyakarta, diluncurkan 2018, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak kode bayar daring, mengurangi antrean, meSnghilangkan pungutan liar. Sistem mendapatkan penghargaan nasional, terkendala gangguan teknis contohnya <i>server error</i> , rendahnya literasi digital wajib pajak usia lanjut. Solusi meliputi pelatihan pegawai, sosialisasi masyarakat. e-SPTPD mendukung transparansi akuntabilitas, memperkuat GCG pengelolaan pajak daerah.
5	Sidiprasetija, A., & Coandi, C. A. (2025). <i>Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis</i> , 6 (4).	Transparansi, tata kelola perusahaan	Kualitatif, studi dokumen dan literatur	Transparansi informasi keuangan pasar modal meningkatkan kepercayaan investor pelaporan triwulanan/tahunan akurat. Prinsip diadaptasi keuangan daerah, kepatuhan regulasi contohnya UU No. 8/1995. Teknologi digital mendukung efisiensi pelaporan, mendukung GCG pemerintahan daerah. Hasil menunjukkan transparansi kunci membangun kepercayaan publik pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
6	Gumilar, M. G. (2019). <i>Jurnal Gama Societa</i> , 3 (1), 19-27.	<i>Smart city</i> , layanan publik	Kualitatif, studi dokumen, eksplorasi aplikasi JSS	JSS, diluncurkan 2018, menyediakan informasi terintegrasi keuangan daerah, perizinan, pengaduan, meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Fitur <i>Single Sign-On</i> dan <i>Location-Based Services</i>

				mempermudah penggunaan. Pemanfaatan JSS baik, memerlukan sosialisasi intensif banner tempat wisata meningkatkan adopsi masyarakat. JSS mendukung transparansi GCG, mempercepat pelayanan publik interaktif.
7	Bahas, M. P. R., & Yamit, Z. (2022). <i>Selekt Manajemen, 1</i> (3), 16-23.	Digitalisasi, kinerja operasional	Kuantitatif, kuesioner 25 karyawan PT. IGP, analisis SmartPLS	Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional serta praktik organisasi PT. IGP Yogyakarta, koefisien beta 0,758 praktik organisasi, 0,459 kinerja operasional. Hasil sesuai dengan topik keuangan daerah, digitalisasi meningkatkan efisiensi pelaporan serta pelayanan publik. Tantangan keterbatasan lokasi penelitian Bantul. Digitalisasi mendukung akuntabilitas, prinsip GCG pengelolaan keuangan.
8	Diansari, R. E., Adhivinna, V. V., Umam, M. S., Nusron, L. A., & Kustanti, T. M. (2022). <i>Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2</i> (3), 763-770.	Digitalisasi, UMKM, tata kelola	Kualitatif, pengabdian masyarakat, sosialisasi, pelatihan	Digitalisasi keuangan UMKM Krebet, Bantul, <i>Microsoft Excel</i> mengurangi risiko kehilangan data, meningkatkan transparansi. Pencatatan manual sebelumnya menyebabkan ketidakakuratan data. Pelatihan dan video tutorial membantu pengelola UMKM mengadopsi teknologi, hal tersebut juga sesuai dengan prinsip digitalisasi keuangan daerah. Temuan mendukung pentingnya pelatihan literasi digital transparansi.
9	Nurfauziah, Albari, Suhartini, & Mulyati, S. (2024). <i>Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services, 4</i> (2), 57-66.	Digitalisasi, UMKM, daya saing	Kualitatif, pengabdian masyarakat, pelatihan pemasaran digital	Program <i>SiBakul Jogja</i> mendukung digitalisasi pemasaran UMKM Ngestiharjo, Bantul, meningkatkan daya saing platform daring. Sebanyak 96 UMKM mendaftar, adopsi teknologi rendah. Pelatihan dan pendampingan meningkatkan literasi digital, sesuai dengan layanan publik ekonomi daerah. <i>SiBakul Jogja</i> mendukung transparansi tata kelola, prinsip GCG.
10	Amari'a, K. H., & Ulinnuha, R. (2023). <i>ICODEV: Indonesian Community Development Journal, 4</i> (2), 57-68.	Digitalisasi, kesejahteraan	Kualitatif, wawancara Dinas Koperasi dan UMKM	<i>SiBakul Jogja</i> meningkatkan omzet UMKM pendataan digital, fasilitas gratis ongkir, mendukung transparansi tata kelola. Tantangan error aplikasi, pelatihan kurang mendalam. Rekomendasi perbaikan aplikasi, pelatihan spesifik mendukung GCG. Hasil menunjukkan digitalisasi memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.
11	Suryani, D. A. (2017). <i>Spirit Publik, 12</i> (1), 35-44.	Good Governance, keterbukaan informasi	Kualitatif, evaluasi UU KIP SAQ, peninjauan website, visitasi	Keterbukaan informasi keuangan DIY, contohnya DPPKA, memperkuat GCG, komitmen badan publik rendah (68% kuesioner dikembalikan). Tantangan keterbatasan SDM dan anggaran. Rekomendasi pelatihan PPID, pengembangan sistem informasi daring. Temuan mendukung digitalisasi keterbukaan informasi, prinsip GCG.

Sumber: Muhammad dan Sari (2021); Kardina et al. (2024); Waskito dan Waskito (2021); Wulandari et al. (2024); Sidiprasetija

dan Coandi (2025); Gumilar (2019); Bahas dan Yamit (2022); Diansari et al. (2022); Nurfauziah et al. (2024); Amari'a dan Ulinnuha (2023); Suryani (2017).

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Publik

Digitalisasi keuangan daerah di Kota Yogyakarta, contohnya aplikasi e-SPTPD dan *Jogja Smart Service* (JSS), meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan publik secara signifikan. Aplikasi e-SPTPD, diluncurkan 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yogyakarta, membantu dalam prosesnya wajib pajak membayar pajak daring kode bayar dikirim via email, mengurangi antrean kantor pajak, mempercepat administrasi (Wulandari et al., 2024). Sistem tersebut menghemat waktu wajib pajak, meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama luar kota, mengakses layanan tanpa hambatan geografis. Keberhasilan e-SPTPD mendapatkan pengakuan nasional, menunjukkan potensi digitalisasi mereformasi pelayanan publik.

Jogja Smart Service (JSS) menyediakan platform terintegrasi mencakup informasi perizinan, pengaduan, pendaftaran antrean puskesmas, dan keuangan daerah, meningkatkan aksesibilitas layanan publik (Gumilar, 2019). Fitur *Single Sign-On* serta *Location-Based Services* mempermudah penggunaan masyarakat, termasuk non-warga Yogyakarta, mengakses informasi real-time. Penelitian memberikan analisis yaitu JSS digunakan luas, jangkauan pengguna hingga luar DIY, memerlukan sosialisasi intensif banner tempat wisata meningkatkan adopsi. Fitur peta serta

augmented reality JSS memperkaya pengalaman pengguna, menjadikan layanan publik interaktif serta responsif.

Penelitian digitalisasi keuangan daerah meningkatkan efisiensi layanan publik. Sistem *Sistem Informasi Manajemen Daerah* (SIMDA) serta *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) mempersingkat penyusunan laporan keuangan, membantu pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya pelayanan publik lebih baik (Kardina et al., 2024). Yogyakarta, sistem *Badan Layanan Umum Daerah* (BLUD) berbasis web mendukung efisiensi menyediakan informasi keuangan diakses masyarakat serta petugas bersamaan, mengurangi ketergantungan proses manual (Waskito & Waskito, 2021). Digitalisasi keuangan daerah Yogyakarta membawa perubahan positif efisiensi serta aksesibilitas layanan publik, memerlukan strategi pendukung memaksimalkan dampaknya.

Kontribusi Digitalisasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas GCG

Digitalisasi keuangan daerah Kota Yogyakarta memperkuat transparansi serta akuntabilitas, pilar utama *Good Corporate Governance* (GCG). Aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) menyediakan laporan keuangan daerah diakses publik, menjelaskan proses masyarakat memantau penggunaan anggaran langsung (Gumilar, 2019). Fitur tersebut mendukung prinsip transparansi GCG memastikan informasi keuangan tersedia format mudah dipahami. JSS memfasilitasi pengaduan masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kinerja pelayanan publik, mendukung pengawasan efektif.

Evaluasi implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) DIY memberikan analisis yaitu keterbukaan informasi keuangan, contohnya dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, meningkatkan akuntabilitas badan publik (Suryani, 2017). Rendahnya komitmen badan publik, hanya 68% kuesioner penilaian mandiri dikembalikan, menunjukkan digitalisasi menjadi solusi mempercepat keterbukaan informasi. Sistem *Badan Layanan Umum Daerah* (BLUD) berbasis web Yogyakarta memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan real-time, mendukung transparansi serta pengawasan publik (Waskito & Waskito, 2021). Sistem tersebut memastikan data keuangan tersedia, akurat, terkini, elemen penting GCG.

Penelitian sektor lain, contohnya pengelolaan wakaf dan UMKM, mendukung pentingnya digitalisasi transparansi serta akuntabilitas. Pengelolaan wakaf DIY menunjukkan laporan keuangan diaudit meningkatkan akuntabilitas, kurangnya rincian penyaluran dana diatasi sistem digital (Muhammad & Sari, 2021). Program *SiBakul Jogja* menciptakan pendataan digital UMKM terstruktur, meningkatkan transparansi tata kelola, mendukung prinsip GCG (Amari'a & Ulinnuha, 2023). Digitalisasi keuangan daerah Yogyakarta memiliki potensi besar memperkuat GCG, memerlukan komitmen badan publik serta infrastruktur teknologi andal.

Kendala Implementasi Digitalisasi dan Solusi

Kendala utama implementasi digitalisasi keuangan daerah Kota Yogyakarta meliputi

rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta gangguan teknis. Penelitian e-SPTPD menunjukkan wajib pajak usia lanjut kesulitan menggunakan aplikasi kurangnya pengetahuan teknologi, menghambat adopsi sistem (Wulandari et al., 2024). Tantangan serupa pengelolaan wakaf DIY, rendahnya kompetensi nazhir pengelolaan data memperlambat akuntabilitas (Muhammad & Sari, 2021). Solusi diusulkan meliputi sosialisasi intensif media daring serta pelatihan teknologi masyarakat meningkatkan literasi digital, mendukung adopsi sistem lebih luas.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan. Penelitian Desa Wisata Kreet, Bantul, menunjukkan pengelola UMKM awalnya tidak memiliki keterampilan menggunakan *Microsoft Excel* pencatatan keuangan, diatasi pelatihan serta video tutorial (Diansari et al., 2022). Evaluasi UU KIP DIY menunjukkan keterbatasan aparatur mengelola informasi publik memerlukan pelatihan intensif *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi* (PPID) (Suryani, 2017). Pelatihan aparatur sipil negara penggunaan sistem digital contohnya SIMDA atau JSS meningkatkan kompetensi, memastikan implementasi efektif. Pendekatan tersebut mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi.

Gangguan teknis, contohnya *server error* e-SPTPD serta error aplikasi *SiBakul Jogja*, mengurangi kepercayaan pengguna sistem digital (Wulandari et al., 2024; Amari'a & Ulinnuha, 2023). Penelitian PT. IGP Yogyakarta menunjukkan investasi infrastruktur teknologi mengatasi masalah

teknis sesuai dalam keuangan daerah (Bahas & Yamit, 2022). Solusi lain evaluasi berkala sistem teknologi informasi, direkomendasikan SIMDA serta SIPD (Kardina et al., 2024). Menggabungkan pelatihan, sosialisasi, serta perbaikan infrastruktur, digitalisasi keuangan daerah Yogyakarta dioptimalkan mendukung layanan publik serta GCG.

Studi Kasus di Yogyakarta

Digitalisasi keuangan daerah di Kota Yogyakarta melalui sistem seperti e-SPTPD, *Jogja Smart Service* (JSS), dan *Badan Layanan Umum Daerah* (BLUD) memberikan dampak nyata pada efisiensi layanan publik dan tata kelola GCG. Aplikasi e-SPTPD, diterapkan sejak 2018 oleh BPKAD Kota Yogyakarta adanya bayar pajak daring dengan kode bayar via email, mengurangi antrean dan menghilangkan potensi pungutan liar (Wulandari et al., 2024). Sistem ini berhasil meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan efisiensi tinggi, mendapatkan penghargaan nasional, tetapi menghadapi kendala literasi digital rendah di kalangan wajib pajak usia lanjut. Sosialisasi melalui media daring dan pelatihan wajib pajak telah dilakukan, tetapi memerlukan intensifikasi untuk menjangkau kelompok masyarakat kurang terampil teknologi.

Jogja Smart Service (JSS), diluncurkan pada 2018, menjadi platform terintegrasi menyediakan informasi keuangan daerah, perizinan, pengaduan, dan pendaftaran antrean puskesmas, meningkatkan aksesibilitas layanan publik (Gumilar, 2019). Dengan fitur *Single Sign-On* dan *Location-Based Services*, JSS mempermudah masyarakat mengakses layanan real-time,

termasuk non-warga Yogyakarta. Data menunjukkan pengguna JSS mencakup wilayah luar DIY, tetapi adopsi masyarakat lokal belum optimal karena kurangnya sosialisasi. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memasang banner di tempat wisata dan stasiun, tetapi kampanye media sosial dan lokakarya teknologi dapat lebih efektif meningkatkan literasi digital. JSS mendukung transparansi GCG dengan laporan keuangan terbuka, memperkuat pengawasan publik.

Sistem BLUD berbasis web, menggunakan *framework Laravel*, memberikan proses penjelasan tentang bagaimana pelaporan keuangan real-time, meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik seperti pengelolaan rumah sakit daerah (Waskito & Waskito, 2021). Pengujian sistem menunjukkan performa baik, tetapi pengembangan versi mobile diperlukan untuk aksesibilitas lebih luas. Kendala teknis seperti *server error* dan keterbatasan aparatur mengelola sistem masih terjadi, sebagaimana terlihat pada e-SPTPD. Evaluasi UU KIP di DIY menunjukkan DPPKA DIY berhasil menyediakan informasi keuangan transparan, tetapi komitmen badan publik rendah, hanya 68% kuesioner penilaian mandiri dikembalikan (Suryani, 2017). Digitalisasi keuangan daerah di Yogyakarta mendukung GCG, tetapi memerlukan pelatihan aparatur dan investasi infrastruktur.

Program *SiBakul Jogja* di DIY menunjukkan digitalisasi pendataan UMKM meningkatkan transparansi tata kelola dan daya saing ekonomi lokal, secara tidak langsung mendukung layanan publik (Nurfauziah et al., 2024; Amari'a &

Ulinnuha, 2023). Sebanyak 96 UMKM di Ngestiharjo, Bantul, mendaftar, tetapi adopsi teknologi rendah karena error aplikasi dan pelatihan kurang mendalam. Pengelolaan wakaf di DIY juga menunjukkan pelaporan keuangan digital dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi koordinasi antarinstansi lemah (Muhammad & Sari, 2021). Studi di PT. IGP Yogyakarta menunjukkan digitalisasi mempercepat pengelolaan data, relevan untuk keuangan daerah (Bahas & Yamit, 2022). Kasus-kasus ini menunjukkan digitalisasi keuangan daerah di Yogyakarta meningkatkan efisiensi layanan publik dan GCG, tetapi memerlukan solusi komprehensif mengatasi kendala teknis dan literasi digital

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Digitalisasi keuangan daerah di Kota Yogyakarta, melalui sistem e-SPTPD, *Jogja Smart Service* (JSS), dan *Badan Layanan Umum Daerah* (BLUD), meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan publik seperti pembayaran pajak dan perizinan daring. Sistem tersebut memperkuat transparansi serta akuntabilitas *Good Corporate Governance* (GCG) menyediakan informasi keuangan real-time, mendukung pengawasan publik. Studi kasus menunjukkan e-SPTPD dan JSS berhasil mereformasi pelayanan publik, tetapi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan aparatur, dan gangguan teknis menghambat implementasi optimal. *SiBakul Jogja* dan pengelolaan wakaf memperlihatkan potensi digitalisasi meningkatkan tata kelola, relevan keuangan daerah. Kendala seperti *server error* dan

koordinasi antarinstansi lemah memerlukan solusi terintegrasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengintensifkan upaya mengatasi kendala digitalisasi keuangan daerah guna mewujudkan GCG dan pelayanan publik berkualitas. Strategi mencakup pelatihan aparatur sipil negara penggunaan sistem digital, sosialisasi masyarakat melalui media daring dan lokakarya, serta investasi infrastruktur teknologi mengurangi gangguan teknis. Koordinasi antarinstansi diperkuat memastikan implementasi sistem terintegrasi. Pendekatan tersebut mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, memperkuat GCG di Kota Yogyakarta.

Saran

1. Menyelenggarakan pelatihan intensif aparatur sipil negara penggunaan sistem digital seperti SIMDA, e-SPTPD, dan JSS.
2. Melaksanakan kampanye sosialisasi masyarakat melalui media daring, banner tempat umum, dan lokakarya teknologi.
3. Menginvestasikan anggaran infrastruktur teknologi, termasuk server dan aplikasi mobile, mengurangi gangguan teknis.
4. Memperkuat koordinasi antarinstansi melalui forum seperti PPID memastikan integrasi sistem digital keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amari'a, K. H., & Ulinnuha, R. (2023). Transformasi kesejahteraan pelaku UMKM melalui digitalisasi pembinaan dalam program "Sibakul Jogja" di Yogyakarta. *ICODEV: Indonesian*

Community Development Journal, 4(2), 57-68.

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/icodev/article/download/9899/3603>

Bahas, M. P. R., & Yamit, Z. (2022). Pengaruh digitalisasi terhadap praktik organisasi dan kinerja operasi pada PT. IGP Internasional Yogyakarta. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(3), 16-23. <https://journal.uui.ac.id/selma/article/download/24218/13928>

Diansari, R. E., Adhivinna, V. V., Umam, M. S., Nusron, L. A., & Kustanti, T. M. (2022). Program digitalisasi dan tata kelola dunia industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Wisata Kreet, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(3), 763-770. <http://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/download/258/199>

Gumilar, M. G. (2019). Inovasi pemerintah daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan *smart and liveable city* di Kota Yogyakarta. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), 19-27. <https://journal.ugm.ac.id/jgs/article/download/50012/27508>

Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Penilaian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2), 615-620. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/pr/article/download/7231/5187>

- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas wakaf (studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94. <https://scholar.archive.org/work/km3lrmsug5aybkz3hb3ag5xa6m/access/wayback/https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/download/9805/pdf>
- Nurfauziah, Albari, Suhartini, & Mulyati, S. (2024). Digitalisasi UMKM melalui program SiBakul Jogja dalam upaya peningkatan daya saing. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 4(2), 57-66. <https://journal.uui.ac.id/rla/article/download/34269/17583>
- Sidiprasetija, A., & Coandi, C. A. (2025). Strategi perseroan terbatas dalam menghadapi tantangan pasar modal global ditinjau dari hukum perusahaan dan prinsip transparansi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/995/553>
- Suryani, D. A. (2017). Mewujudkan *Good Governance* badan publik negara di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui keterbukaan informasi publik. *Spirit Publik*, 12(1), 35-44. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/viewFile/11736/10398>
- Waskito, N. P., & Waskito, N. P. (2021). Perancangan sistem informasi keuangan BLUD Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan *framework Laravel*. Tidak disebutkan nama jurnal. <https://subset.id/index.php/IJCSR/article/download/1/1>
- Wulandari, I. T., Rahmawati, A., & Maemunah, M. (2024). Inovasi pelayanan pajak daerah melalui e-SPTPD pada BPKAD Kota Yogyakarta. *Jurnal JISIPOL*, 8(1), 98-108. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1376/1079>